

SRI MELYANTI
MUHAMMAD HASAN
MUHAMMAD DINAR



BUKU SAKU EKONOMI
BERBASIS MIND MAPPING

PERPAJAKAN

Untuk Kelas XI IPS SMA/MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Sehingga Buku Saku Ekonomi berbasis *Mind Mapping* ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran ekonomi, khususnya dalam materi Perpajakan.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan buku saku ini. Semoga Buku Saku Ekonomi Berbasis *Mind Mapping* dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran ekonomi.

Makassar, 20 April 2019
Penyusun

Sri Melyanti,
Muhammad Hasan,
Muhammad Dinar

PENGUNAAN BUKU SAKU

Buku saku ekonomi berbasis *mind mapping* ini berisi materi singkat mengenai perpajakan yang akan memudahkan siswa dalam belajar ekonomi. Buku saku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dengan tampilan berwarna dan penggunaan *mind mapping* agar siswa tidak cepat merasa bosan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Penggunaan Buku Saku.....	iii
Daftar Isi	iv
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.....	1
Peta Konsep.....	2
A. Konsep Dasar Pajak	3
B. Tarif Pajak	14
C. Asas Pemungutan Pajak.....	16
D. Pengelompokan Pajak	18
E. Sistem Pemungutan Pajak	25
F. Objek Pajak	27
G. Alur Administrasi Perpajakan di Indonesia.....	27
H. Tantangan Pemungutan Pajak.....	29
Latihan Soal	30
Daftar Pustaka	36

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

PERPAJAKAN

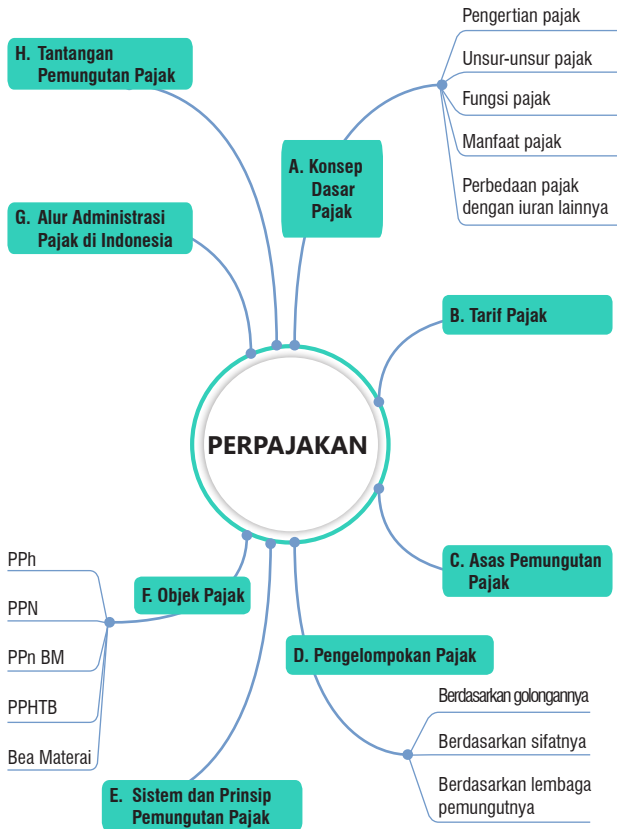
Kompetensi Inti:

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar:

- 3.7 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi.
- 4.7 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi.

PETA KONSEP



A. KONSEP DASAR PAJAK

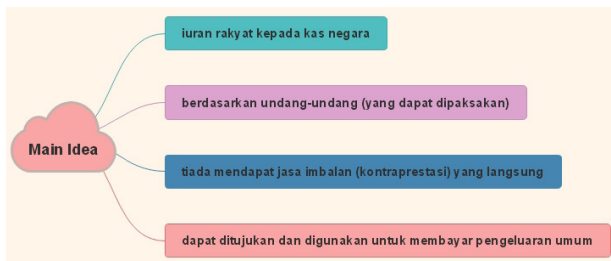


1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



2. Unsur-unsur Pajak

Berdasarkan pengertian di atas yang telah dijelaskan, pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Bersifat memaksa. Pemungutan pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak.
- Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

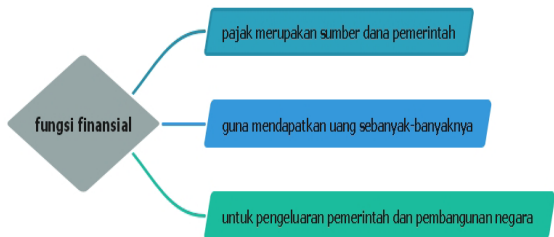
- d. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat.

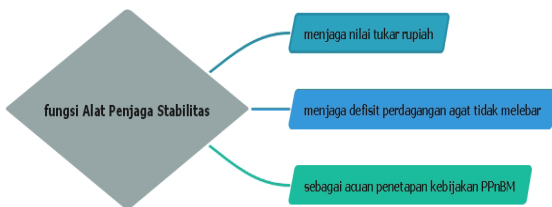
a. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.



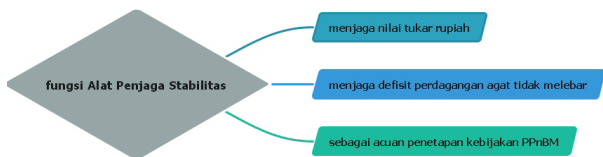
b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara Fiskus dan Wajib Pajak.



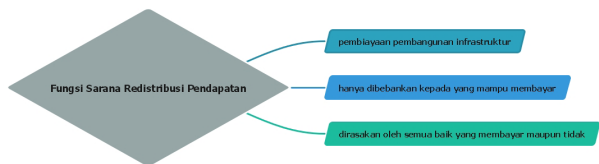
c. Fungsi Alat Penjaga Stabilitas

Fungsi alat penjaga stabilitas bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM

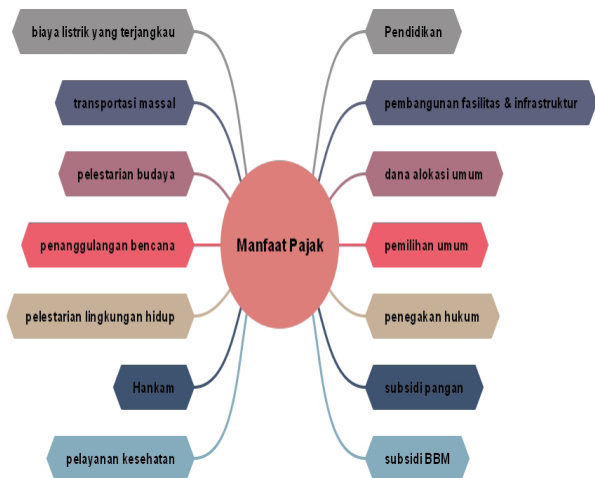


d. Fungsi Sarana Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.



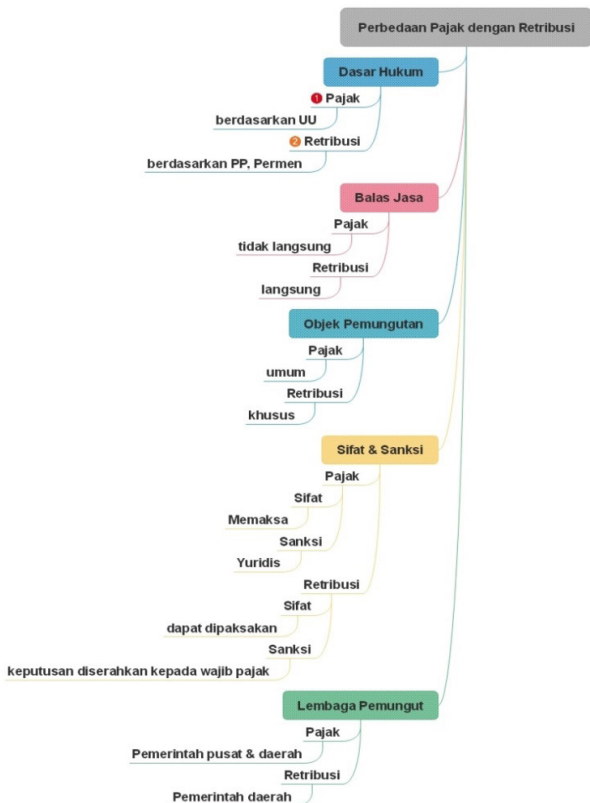
4. Manfaat Pajak



Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk membiayai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Menurut Hadi (2013) manfaat pajak yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur
- c. Dana alokasi umum
- d. Pemilihan umum
- e. Penegakan hukum
- f. Subsidi pangan
- g. Subsidi BBM
- h. Pelayanan kesehatan
- i. Pertahanan dan keamanan (hankam)
- j. Pelestarian lingkungan hidup
- k. Penanggulangan bencana
- l. Pelestarian budaya
- m. Transportasi massal
- n. Menyediakan biaya listrik yang relative terjangkau oleh masyarakat

5. Perbedaan Pajak dengan Iuran Lainnya



a. Dasar Hukum

Pada pajak pemungutan diatur berdasarkan undang undang. Adapun pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah.

b. Balas Jasa

Pada pajak, balas jasa tidak bias ditunjukkan secara langsung. Adapun pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu.

c. Objek Pemungutan

Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum. Artinya, pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat. Adapun pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.

d. Sifat dan Sanksi

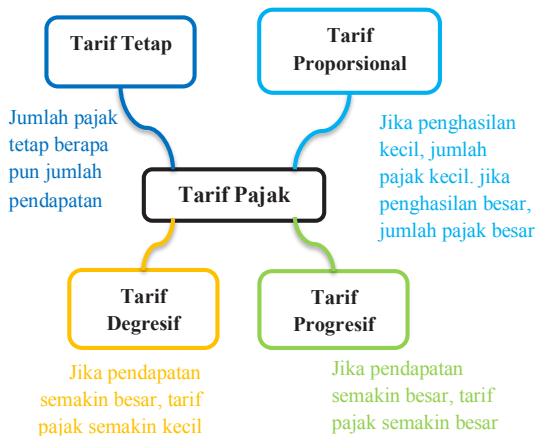
Pada pajak, pemungutan bersifat memaksa dan barang siapa yang tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi

secara yuridis. Pada retribusi, pemungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.

e. Lembaga Pemungut

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja.

B. TARIF PAJAK



Tarif pajak dapat dihitung dengan empat tarif, yaitu sebagai berikut.

1. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar maka jumlah pajaknya juga besar.

2. Tarif Progresif

Penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula.

3. Tarif Degresif

Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil.

4. Tarif Tetap

Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapa pun jumlah pendapatan.

C. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Untuk itu, pemungutan pajak hendaknya menjunjung tinggi asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *wealth of Nation*. Adapun asas-asasnya sebagai berikut.

1. **Equality**

Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. **Certainty**

Asas ini menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak, seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan

kewajiban membayar pajak karena segala sesuatunya sudah jelas.

3. ***Convenience of payment***

Asas ini menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang telah memenuhi syarat objektnya yaitu penghasilan di atas penghasilan minimumnya.

4. **Economics**

Asas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut.

D. PENGELOMPOKAN PAJAK



Pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II : pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.

Pajak Penghasilan

- a. Dasar hukum pajak penghasilan adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang mulai berlaku 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- b. Subjek pajak penghasilan: 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum dibagi; 3) badan; 4) bentuk usaha tetap, yaitu subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

- c. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- d. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak. Sebagai berikut
 - 1) Rp15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
 - 2) Rp1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
 - 3) Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan rppenghasilan suami
 - 4) Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak

angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk satu keluarga.

- e. Tarif pajak penghasilan
- 1) Tarif pajak penghasilan wajib pajak adalah sebagai berikut

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

- 2) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk badan usaha tetap adalah sebesar 25 %. Untuk lebih memahami apa yang kita uraikan di atas, ikutilah dengan cermat contoh soal berikut ini.

Contoh 1 : Sunardi telah menikah dan mempunyai 2 anak. Hitunglah pendapatan tidak kena pajak (PTKP) untuk Sunardi.

Jawab

Pendapatan tidak kena pajak untuk Sunardi

Sunardi	Rp15.840.000
Istri (tidak bekerja)	Rp 1.320.000
Untuk 2 anak	Rp 1.320.000
	<u>Rp 2.640.000</u> +
Jumlah PTKP	Rp19.800.000

Artinya, jika Sunardi hanya mempunyai penghasilan kurang dari Rp19.800.000 selama satu tahun pajak, ia tidak peduli membayar pajak penghasilan. Namun, jika ia misalnya mempunyai penghasilan Rp30.000.000,00 per tahun, pendapatan kena pajak sunardi adalah Rp 10.200.000,00 (Rp30.000.000,00 – Rp19.800.000,00)

Contoh 2 : Permadi telah menikah dan mempunyau 2 anak. Ia mempunyau pendapatan kena pajak Rp 539.550.000,00 selama setahun. Hitunglah pajak terutang Permadi.

Jawab

Pendapatan kena pajak dibulatkan ke bawah menjadi Rp 539.550.000,00

$Rp50.000.000 \times 5\% = Rp2.500.000$
 $Rp200.000.000 \times 15\% = Rp30.000.000$
 $Rp250.000.000 \times 25\% = Rp62.500.000$
 $Rp539.550.000 \times 30\% = \underline{Rp11.865.000} +$
Jumlah PPh terutang = $Rp106.865.000,00$

Pendapatan tidak kena pajak tidak perlu dihitung karena telah diberitahukan dalam soal pendapatan kena pajak (PKP). Sehingga, pajak terutang dihitung langsung dari jumlah setelah dibulatkan.

Contoh 3: berapa pajak penghasilan terutang jika pendapatan kena pajak dari PT Mulia Baru (badan usaha) berjumlah $Rp539.550.000$?

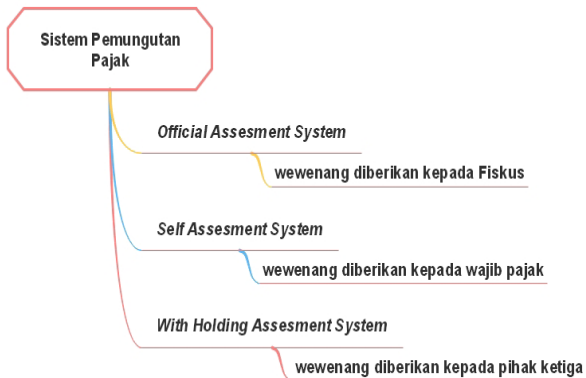
Jawab

Pajak penghasilan terutang $25\% \times Rp539.550.000 = Rp134.887.500,00$

Catatan: untuk PKP yang sama dengan orang pribadi atau badan usaha, ternyata pajak penghasilan terutang badan usaha tetap lebih mahal daripada pajak penghasilan terutang perorangan.

E. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Ada tiga sisitem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding Assesment System*.



1. *Official Assesment System*, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri system ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

- b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri system ini adalah:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
 - b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi
3. *With Holding Assesment System* dalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk meentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

F. OBJEK PAJAK

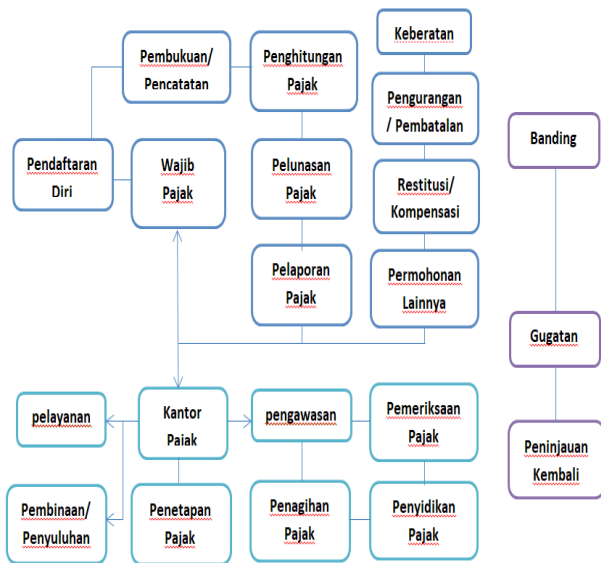
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama lain dalam bentuk apa. Beberapa jenis pajak yang menjadi objek pajak yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Materai

G. ALUR ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Landasan alur prosedur administrasi pajak adalah prinsip sistem perpajakan *self assesment*. Dalam sistem ini, wajib pajak hendaknya lebih proaktif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak melakukan sendiri pendaftaran, penghitungan,

penyetoran hingga pelaporan pajak. Di lain pihak, kantor pajak memiliki tugas melayani wajib pajak. Kantor pajak memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan hingga pada langkah-langkah penegakan hukum (*law enforcement*). Secara garis besar, prosedur administrasi perpajakan yang lazim terjadi dapat dilihat pada peraga berikut.



H. TANTANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realitas masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Sebagai perbandingan, dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp24,3 juta/tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun, jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22 juta orang tersebut, di tahun 2012, menanggung kontribusi penerimaan sebesar Rp200 triliun yang dialokasikan untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 juta jiwa lainnya. Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan.

Selain beberapa hal di atas, kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu system perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu system yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan UU perpajakan. Ini yang menjadi tantangan pemungutan pajak.

LATIHAN SOAL

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Semua pemungutan pajak dapat digunakan sebagai sarana mengatur kegiatan konsumsi, produksi, dan perdagangan. Hal tersebut menunjukkan pajak mempunyai fungsi
 - a. Keadilan
 - b. Pengatur
 - c. Distribusi
 - d. Moneter
 - e. Bujeter

2. Tarif pajak tetap tetapi makin besar pendapatan makin besar pula pajak yang harus dibayar. Sistem pajak tersebut adalah sistem
 - a. Progressif
 - b. Proporsional
 - c. Tarif tetap
 - d. Degresif
 - e. Regresif

3. Beban pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain disebut pajak
 - a. Penjualan
 - b. Langsung
 - c. Tidak langsung
 - d. Pembelian
 - e. Pertukaran
4. Berikut yang bukan fungsi pajak adalah
 - a. Fungsi bujeter
 - b. Fungsi mengatur
 - c. Fungsi stabilitas
 - d. Pengendali badan usaha milik Negara
 - e. Sarana redistribusi pendapatan
5. Berikut yang bukan asas pemungutan pajak adalah asas
 - a. *Continuity*
 - b. *Equality*
 - c. *Certainty*
 - d. *Convenience*
 - e. *Economics*
6. Perbedaan pajak dengan iuran lainnya adalah
 - a. Pajak jumlahnya sangat besar, sedang iuran lainnya jumlahnya relative kecil

- b. Pajak dipungut atas dasar undang-undang, iuran lainnya dipungut atas dasar peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah
- c. Pajak dipungut untuk pengeluaran kolektif, iuran lainnya untuk yujuan tertentu
- d. Pajak dipungut secara teratur, iuran lainnya dipungut kalau adaa bencana alam nasional
- e. Pungutan pajak disetor melalui bank, sedang iuran lainnya disetor tunai

7. Berikut adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung

- 1) Pajak penghasilan
- 2) Pajak pertambahan nilai
- 3) Pajak penjualan
- 4) Pajak bumi dan bangunan

Penggolongan pajak langsung ditunjukkan nomor

....

- a. 1) dan 2)
- b. 1) dan 3)
- c. 1) dan 4)
- d. 2) dan 3)
- e. 3) dan 4)

8. Berikut adalah jenis pajak.
- 1) Pajak penjualan
 - 2) Pajak pertambahan nilai
 - 3) Pajak penghasilan
 - 4) Pajak bumi dan bangunan
 - 5) Cukai

Kategori pajak tidak langsung ditunjukkan nomor

....

- a. 1), 2), dan 3)
 - b. 1), 2), dan 4)
 - c. 1), 2), dan 5)
 - d. 2), 3), dan 5)
 - e. 3), 4), dan 5)
9. Andi memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp 38.750.000,00. Atas dasar pengenaan Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan terutang Andi adalah
- a. Rp 1.937.500,00
 - b. Rp 5.812.500,00
 - c. Rp 9.687.500,00
 - d. Rp11.625.000,00
 - e. Rp12.750.000,00

10. Anwar memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp135.800.000,00. Anwar telah menikah dan mempunyai anak 3 orang. Atas dasar pengenaan pajak menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan terutang Anwar adalah
- a. Rp6.790.000,00
 - b. Rp15.370.000,00
 - c. Rp20.370.000,00
 - d. Rp33.950.000,00
 - e. Rp35.750.000,00

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat

1. Tuliskan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H!

Jawab:
.....
.....

2. Tuliskan dan jelaskan fungsi pajak!

Jawab:
.....
.....

3. Jelaskan pembagian pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya!

Jawab:
.....
.....

4. Jelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia!

Jawab:
.....
.....

5. Jelaskan siapa yang menjadi objek pajak!

Jawab:
.....
.....

6. Jelaskan alur administrasi perpajakan di Indonesia!

Jawab:
.....
.....

7. Bagaimana tantangan pemungutan pajak di Indonesia?

Jawab:
.....
.....

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. 2016. *Ekonomi: Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Esis.
- Fidel. 2010. *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai dari Konsep Dasar sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana
- Geminastiti, Kinanti dan Nurlita, Nella. 2016. *Ekonomi : Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Untuk SMA/ MA Kelas XI*. Bandung: Yrama Widya.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan : Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, tentang "Pajak Penghasilan"